



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN PLT. DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI DAN KEPALA BPH
MIGAS, KEPALA SKK MIGAS, DIREKTUR UTAMA PT PGN, DAN
DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA GAS**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas, Direktur Utama PT PGN dan Direktur Utama PT Pertamina Gas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 12 Februari 2018
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 16.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ...Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : ...Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemeritah	: Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas, Drektur Utama PT PGN dan Direktur Utama PT Pertamina Gas
Acara	: 1. Kebijakan Gas Domestik dan Jaringan Gas. 2. Penjelasan terkait proyek pisanisasi Kalimantan Jawa (KALIJA). 3. Dan lain-lain.

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 dibuka pukul 13.20 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si, dan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Kebijakan Gas Domestik dan Jaringan Gas.
 - b. Penjelasan terkait proyek pipanisasi Kalimantan Jawa (KALIJA).
 - c. Dan lain-lain.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas untuk melakukan koordinasi antar instansi terkait termasuk BUMN Migas untuk menjamin tersedianya pasokan gas untuk kebutuhan domestik.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas untuk membuat cetak biru tata kelola gas diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur gas dan LNG *receiving terminal* di Pantai Utara Jawa sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan alokasi, distribusi, dan harga gas nasional.
3. Komisi VII DPR RI meminta kepala BPH Migas untuk menyampaikan data secara detail pemenang dan waktu tender terkait investasi gas bumi melalui pipa dan menyampaikan kepada Komisi VII DPR RI.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas agar lebih cermat dan seksama dalam melakukan studi dan perencanaan pembangunan infrastruktur gas agar tidak terjadi persoalan seperti pada pembangunan jaringan pipa gas yang belum dapat dilaksanakan karena persoalan cadangan gas bumi yang tidak cukup, serta belum adanya kepastian pengembangan lapangan CBM dan *Shale Gas*.
5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas, dalam pengelolaan gas bumi domestik untuk percepatan perwujudan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui kerjasama operasi infrastruktur dan niaga, yang dimiliki oleh PGN dan Pertagas di seluruh wilayah tanah air, termasuk melakukan penugasan Pemerintah.
6. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas segera menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait dengan masalah Kalimantan Jawa Gas, agar tidak menghambat investasi pembangunan pipanisasi lainnya.
7. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina Gas dan Dirut PT PGN untuk menuntaskan permasalahan kebijakan gas domestik dan jaringan gas dalam Panja Migas Komisi VII DPR RI.
8. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, untuk membuat kajian terkait jaringan gas rumah tangga satu harga.



9. Komisi VII DPR RI meminta jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 19 Februari 2018 dan disertai data terkait persetujuan POD Lapangan Kepodang/ Kalija I.

III. PENUTUP

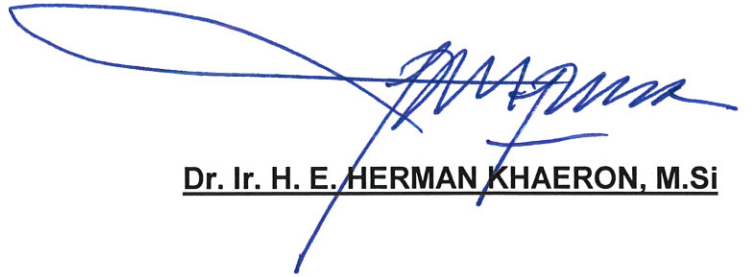
Rapat ditutup 16.10 WIB

Jakarta, 12 Februari 2018
KETUA RAPAT,

**Pit. DIRJEN MIGAS
KEMENTERIAN ESDM RI**



EGO SYAHRIL



Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si

KEPALA BPH MIGAS



Dr. M. FANSHURULLAH ASA, MT

WAKIL KEPALA SKK MIGAS



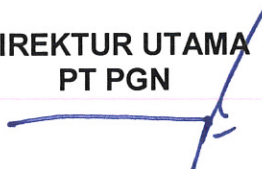
SUKANDAR

**DIREKTUR UTAMA
PT PERTAMINA GAS**



SUKO HARTONO

**DIREKTUR UTAMA
PT PGN**



JOBI TRIANANDA HASJIM